



TAHUN  
2025

**PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

**Jalan Pemuda No. 35, Purwodadi**

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 35 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 5811  
Telepon (0292) 421035, Faksimile (0292) 421035  
Laman disdik.gobogan.go.id, Pos-el disdik@grobogan.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kab. Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Pendidikan Kab. Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Purwodadi, 26 Maret 2026  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**Drs. H. Purnyomo, M.Pd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1967112719995121002



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, 26 Maret 2026  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

Drs. H. Purnyomo, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196711271995121002





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	XX
A. Latar Belakang	XX
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	XX
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	XX
D. Landasan Hukum	XX
E. Sistematika	XX
BAB II PERENCANAAN KINERJA	XX
A. Rencana Strategis	XX
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	XX
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	XX
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	XX
A. Pengukuran Kinerja	XX
B. Capaian Kinerja Organisasi	XX
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025	XX
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	XX
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	XX
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	XX
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	XX
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	XX
C. Realisasi Anggaran	XX
BAB IV PENUTUP	XX
LAMPIRAN	XX
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	XX
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	XX



# BAB I

# PENDAHULUAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

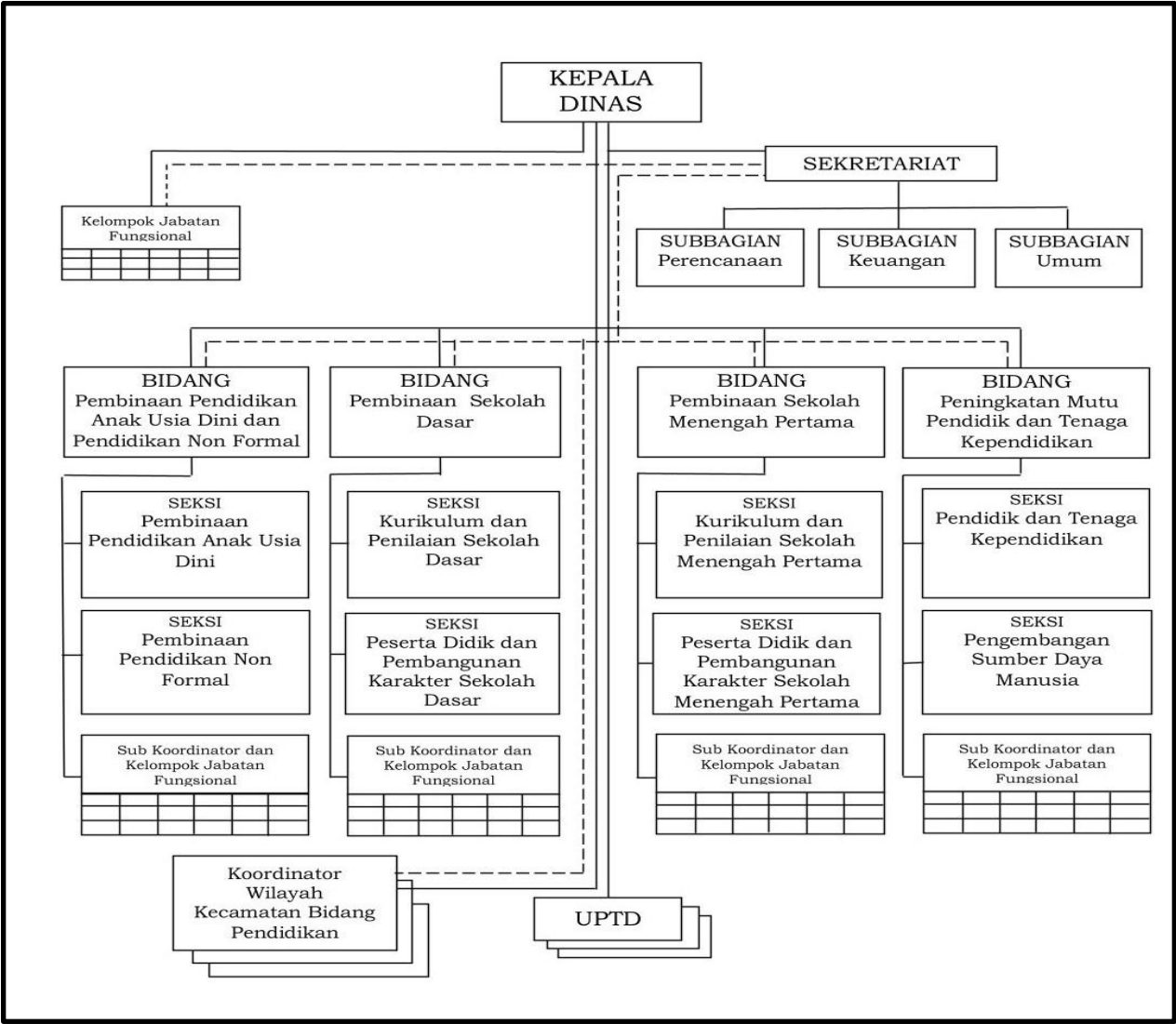
- perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan;
- pembinaan dan pengendalian di bidang Pendidikan;
- pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendidikan;
- pengelolaan kesekretariatan dinas;
- pengelolaan koordinator wilayah pendidikan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang,



Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi/Sub Koordinator. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Gambar 1  
Struktur Organisasi  
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan





### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 sebagai berikut :

- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan.
2. Meningkat-nya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan

### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 08 Tahun 2024. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV    PENUTUP**

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam



Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah:

**“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan
- Misi 2 : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya
- Misi 4 : Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan mengacu pada Misi ke-3, yaitu;

*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan Berbudaya*

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil



yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas			Harapan Lama Sekolah	12,69	13,19	13,36	13,5 4	13,71
				Rata-rata Lama	7,50	7,80	7,90	8,00	8,09
		1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kes etaran	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	58,15	59,15	60,15	61,15	62,15
		1.2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	69	70	71	72	72
			Nilai IKM Perangkat Daerah	99,4	99,6	99,8	100	100
			Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan periode 2025-2029

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas	1.1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib	$FK \sum_{i=a}^1 \frac{Ei}{Pi}$	BPS



					belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.		
		1.2	Rata-rata Lama	Tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	BPS

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2025

## B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2025**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,19
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,80
		1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaran	%	90,50
				Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan	Rasio	58,15

				Nonformal / Kesetaraan terakreditasi Minimal B.		
		1.2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69
				Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks	99,4
				Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Nilai	100

Sumber: Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2025

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP	%	92,63
		2. Persentase Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terakreditasi minimal B	%	57,07
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip	Nilai	69 (B)
		2. Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	99,00
		3. Nilai Resiko Manajemen Perangkat Daerah	Nilai	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan :

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Sakip</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntabilitas public</li> <li>• Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang perangkat daerah</li> <li>• Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 69</li> <li>• 99,00</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> </ul>	811.397.089.837
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APS PAUD</li> <li>• APS SD/MI</li> <li>• APS SMP/MTs</li> <li>• APS PNF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93,32%</li> <li>• 93,75%</li> <li>• 91,14%</li> <li>• 15,59%</li> </ul>	237.027.968.000
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	• 0,40	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2025 telah ditetapkan Perubahan Anggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pendidikan Tahun 2025**


NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Sakip</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Persentase Laporan Keuangan sesuai standar akuntabilitas public</li> <li>• Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang perangkat daerah</li> <li>Persentase pemenuhan dokumen penilaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 69</li> <li>• 99,00</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> </ul>	823.953.408.822

		manajemen resiko		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APS PAUD</li> <li>• APS SD/MI</li> <li>• APS SMP/MTs</li> <li>• APS PNF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93,32%</li> <li>• 93,75%</li> <li>• 91,14%</li> <li>• 15,59%</li> </ul>	249.248.975.426
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,40</li> </ul>	133.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2025 (setelah perubahan)

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan.

## **B. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

## 1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Tahun 2025**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas	Harapan Lama Sekolah	13,19	12,58	95,38	Sangat tinggi	BPS
		Rata-rata Lama Sekolah	7,80	7,51	96,28	Sangat tinggi	BPS
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatny a aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Keseta ran	90,50	89,53	98,93	Sangat tinggi	Disdik
		Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Nonformal / Kesetaraan	58,15	80,30	138,09	Sangat tinggi	Disdik

		terakreditasi Minimal B.					
1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	74,45 (BB)	107,90	Sangat tinggi	Bag Organisasi Setda
		Nilai IKM Perangkat Daerah	99,4	96,10	96,68	Sangat Tinggi	Disdik
		Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	100	3,456	3,456	Sangat Rendah	Inspektorat

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 95,83% dengan kategori sangat tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 118,51% atau kategori sangat tinggi dan capaian kinerja sasaran 1.2 mencapai 102,29% atau kategori sangat tinggi. Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 110,4%, dengan kategori sangat tinggi.

## **2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas	Harapan Lama Sekolah	12,33	12,46	101,05	12,34	12,48	101,13	13,19	12,58	95,38
		Rata-rata Lama	7,00	7,28	104,00	7,04	7,29	103,55	7,80	7,51	96,28
1.1	Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaran	92,43	88,73	96,00	92,53	90,15	97,43	90,50	89,53	98,93
		Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Nonformal / Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	75,76	54,13	57,55	55,59	57,69	103,78	58,15	80,30	138,09
1.2	Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	B (65)	0	0	(65) B	69 (B)	106,15	69	74,45 (BB)	107,90
		Indek Kepuasan Masyarakat	88	97,94	111,30	90	99,2	110,22	99,4	96,10	96,68

		Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	100	3,456	3,456
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-------	-------

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan rata-rata prosentase capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2025 ada yang naik dan ada juga yang turun. Meskipun capaian 2025 ada yang turun tetapi masih dalam kategori sangat tinggi (nilai rata-rata capaian > 91%) sebagai berikut :

- Tujuan 1 dengan Indikator harapan lama sekolah tahun 2023 dari target 12.33 terealisasi 12,46 (101,05%). Tahun 2024 dari target 12,34 terealisasi 12,48 (101,13%). Tahun 2025 dari target 13,19 terealisasi 12,58 (95,38%). Meskipun terjadi penurunan rata-rata prosentase capaian namun rata-rata prosentase capaian masih di atas 91% (kategori sangat tinggi).
- Indikator rata -rata lama sekolah tahun 2023 dari target 7,00 terealisasi 7,28 (104,00%). Tahun 2024 dari target 7,04 terealisasi 7,29 (103,55%). Tahun 2025 dari target 7,80 terealisasi 7,61 (96,28%). Meskipun terjadi penurunan rata-rata prosentase capaian namun rata-rata prosentase capaian masih di atas 91% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dari target 92,43 terealisasi sebesar 88,73 (96,00%). Tahun 2024 dari target 92,53 terealisasi 90,15 (97,43%). Tahun 2025 dari target 90,50 terealisasi 89,53 (98,93%). Secara umum persentase capaian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mendekati target yang ditetapkan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai 100%, capaian kinerja berada pada kategori tinggi karena seluruh persentase realisasi berada di atas 90%.
- Indikator Rasio Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan Terakreditasi Minimal B pada tahun 2023 dari target 75,76 terealisasi sebesar 54,13 (57,55%). Tahun 2024 dari target 55,59 terealisasi 57,69 (103,78%). Tahun 2025 dari target 58,15 terealisasi 80,30 (138,09%). Pada tahun 2023 capaian kinerja

masih berada di bawah target, namun pada tahun 2024 dan 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan mutu satuan pendidikan yang cukup optimal, terutama dalam peningkatan status akreditasi. Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dan berada pada kategori sangat tinggi pada dua tahun terakhir.

- Indikator Nilai SAKIP menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ditargetkan memperoleh predikat B (65), dengan realisasi 69 (B) atau sebesar 106,15%. Pada tahun 2024 target tetap pada predikat B (69) dan terealisasi 74,45 (BB) atau 107,90%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, bahkan melampaui target yang ditetapkan serta mengalami kenaikan predikat dari B menjadi BB. Secara umum, capaian indikator ini berada pada kategori sangat tinggi, karena persentase realisasi berada di atas 100% dan menunjukkan tren peningkatan yang positif.
- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 dari target 88 terealisasi sebesar 97,94 (111,30%). Tahun 2024 dari target 90 terealisasi 99,2 (110,22%). Tahun 2025 dari target 99,4 terealisasi 96,10 (96,68%). Pada tahun 2023 dan 2024 capaian melampaui target yang ditetapkan dengan kategori sangat tinggi. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase capaian dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara umum realisasi masih berada pada kategori tinggi karena mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dengan baik walaupun memerlukan peningkatan konsistensi pada tahun terakhir.
- Indikator Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah pada tahun 2023 dan 2024 belum menunjukkan capaian (nilai 0). Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100, realisasi 3,456. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko perangkat daerah belum berjalan optimal dan memerlukan perhatian serius. Indikator ini berada pada kategori sangat rendah, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mendorong penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur dalam mendukung akuntabilitas kinerja organisasi.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025**  
**dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan 1 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.	Harapan Lama Sekolah	12,58	13,88	90,63
		Rata-rata Lama	7,51	8,19	91,69
1.1	Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaran	89,53	92,50	96,78
		Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Nonformal / Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	80,30	62,15	129,20
1.2	Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,45	72	103,40

	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	96,10	100	96,1
	Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	3,456	100	3,456

Dari analisis tabel di atas, bahwa rata – rata tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja tujuan 1 mencapai 91,16%, sehingga untuk potensi mencapai target jangka menengah pada tahun 2029 sangat mungkin tercapai meskipun dengan usaha yang lebih keras. Sedangkan untuk rata – rata tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 112,99% sudah tercapai perlu dipertahankan dan indikator kinerja sasaran 1.2 rata – rata tingkat kemajuan mencapai 69,34%, capaian kategori sedang dikarenakan target nilai Manajemen Resiko (MR) Dinas Pendidikan di Dokumen Renstra terlalu tinggi (100%) yang sulit dicapai.

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten lain**

No.	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase capaian	
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	Harapan Lama Sekolah	12,58	13,05	13,30	96,40	94,59
2	Rata-rata Lama	7,51	8,15	9,07	92,15	82,80

Dari tabel di atas, capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian provinsi indikator harapan lama sekolah capaian kinerja provinsi lebih tinggi dari capaian

kabupaten dengan persentase 97%, indikator rata – rata lama sekolah capaian kinerja provinsi juga lebih tinggi dari capaian kabupaten dengan persentase 90,89. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional tidak bisa dibandingkan dikarenakan tidak ditemukan data untuk 2 indikator di atas.

## 5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan 1 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas	Harapan Lama Sekolah	13,19	12,58	95,38	Dari data pokok Pendidikan (Dapodik) untuk satdik dibawah naungan Kemendikbud maupun Emis untuk satdik dibawah naungan kemenag diketahui masih banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi	Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mencanangkan “Gemes” akronim dari Gerakan Mesti Sekolah yang bertujuan untuk mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali ke Sekolah. Yang diawali dengan pendataan ATS, Sosialisasi ATS, pemberian Bantuan perlengkapan Sekolah bagi sswa ATS

							bekerjasama dengan Lembaga PKBM, CSR Bak Jateng.
		Rata-rata Lama	7,80	7,51	96,28		
1.1	Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan	90,50	89,53	98,93		
		Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Nonformal / Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	58,15	80,30	138,09		
1.2	Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	69	74,45 (BB)	107,90		
		Indek Kepuasan Masyarakat	99,4	96,10	96,68		
		Nilai Manajemen	100	3,456	3,456		

		Resiko Perangkat Daerah					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7**

NO	Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas	10,50	10,05	95,71%	1.073.335.384.248	1.046.806.140.772	97,53%	-2%	1.027.313.381.112	-19.492.759.660	Tidak Efisien
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	74,33	84,915	114,25%	249.381.975.426	247.834.579.116	99%	15%	284.914.503.105	37.079.923.989	Efisien
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	89,47	58,002	69,34%	823.953.408.822	798.971.561.656	97%	-28%	571.329.293.677	-227.642.267.979	Tidak Efisien
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100	100	100%	823.953.408.822	798.971.561.656	97%	3%	823.953.408.822	24.981.847.166	Efisien
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	478.799.800	464.976.000	97%	3%	478.799.800	13.823.800	Efisien
	Penyusunan Dokumen	2	2	100%	150.000.000	148.649.314	99%	1%	150.000.000	1.350.686	Efisien

	Perencanaan Perangkat Daerah										
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100%	15.300.000	15.200.437	99%	1%	15.300.000	99.563	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	15.300.000	12.533.737	82%	22%	15.300.000	2.766.263	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	15.300.000	15.200.437	99%	1%	15.300.000	99.563	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	15.300.000	15.247.668	100%	0%	15.300.000	52.332	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100%	212.599.800	203.439.543	96%	5%	212.599.800	9.160.257	Efisien
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%	55.000.000	54.704.864	99%	1%	55.000.000	295.136	Efisien
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	816.675.440.022	792.040.445.254	97%	3%	816.675.440.022	24.634.994.768	Efisien
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	100%	816.645.440.022	792.013.181.554	97%	3%	816.645.440.022	24.632.258.468	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	30.000.000	27.263.700	91%	10%	30.000.000	2.736.300	Efisien
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100	100%	1.343.815.000	1.138.802.801	85%	18%	1.343.815.000	205.012.199	Efisien
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	1	100%	30.000.000	29.518.730	98%	2%	30.000.000	481.270	Efisien
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1	1	100%	25.000.000	24.289.964	97%	3%	25.000.000	710.036	Efisien
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100%	41.000.000	38.482.313	94%	7%	41.000.000	2.517.687	Efisien
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100%	560.000.000	516.055.800	92%	9%	560.00.000	43.944.200	Efisien
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1	1	100%	43.200.000	42.174.707	98%	2%	43.200.000	1.025.293	Efisien
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	1	1	100%	30.000.000	29.565.000	99%	1%	30.000.000	435.000	Efisien
	Penyediaan bahan/material	1	1	100%	122.115.000	118.352.641	97%	3%	122.115.000	3.762.359	Efisien
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	100%	492.500.000	340.363.646	69%	45%	492.500.000	152.136.354	Efisien

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	100	100%	3.260.000.000	3.225.080.555	99%	1%	3.260.000.000	34.919.445	Efisien
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	100%	60.000.000	59.252.800	99%	1%	60.000.000	747.200	Efisien
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	100%	3.200.000.000	3.165.827.755	99%	1%	3.200.000.000	34.172.245	Efisien
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100%	1.645.310.000	1.566.384.066	95%	5%	1.645.310.000	78.925.934	Efisien
	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100%	40.000.000	40.000.000	100%	0%	40.000.000	-	Impas
	Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	1	1	100%	768.190.000	729.923.066	95%	5%	768.190.000	38.266.934	Efisien
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1	1	100%	837.120.000	796.461.000	95%	5%	837.120.000	40.659.000	Efisien
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100%	550.044.000	535.872.980	97%	3%	550.044.000	14.171.020	Efisien
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	100%	210.478.000	201.486.180	96%	4%	210.478.000	8.991.820	Efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100%	219.566.000	214.771.550	98%	2%	219.566.000	4.794.450	Efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100%	120.000.000	119.615.250	100%	0%	120.000.000	384.750	Efisien
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	100	100	100%	249.248.975.426	247.719.421.581	99%	1%	249.248.975.426	1.529.553.845	Efisien
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	100	100	100%	148.780.192.264	147.906.116.521	99%	1%	148.780.192.264	874.075.743	Efisien
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3	3	100%	400.000.000	398.750.000	100%	0%	400.000.000	1.250.000	Efisien
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	39	39	100%	5.945.534.000	5.909.441.000	99%	1%	5.945.534.000	36.093.000	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3	3	100%	637.064.000	627.759.000	99%	1%	637.064.000	9.305.000	Efisien

	Rehabilitas Sedang/Berat perpustakaan Sekolah	1	1	100%	700.731.000	693.432.000	99%	1%	700.731.000	7.299.000	Efisien
	Pengadaan Mebel Sekolah	6	6	100%	2.709.610.000	2.697.966.195	100%	0%	2.709.610.000	11.643.805	Efisien
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1500	1500	100%	200.000.000	159.280.737	80%	26%	200.000.000	40.719.263	Efisien
	Penyediaan pendidik dan tenaga kesatuan kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah Dasar	1000	1000	100%	3.793.200.000	3.407.050.000	90%	11%	3.793.200.000	386.150.000	Efisien
	Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	95	95	100%	67.300.000	50.091.750	74%	34%	67.300.000	17.208.250	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah	15	15	100%	1.235.000.000	1.235.000.000	100%	0%	1.235.000.000	-	Impas
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	805	805	100%	103.499.242.323	103.407.206.234	100%	0%	103.499.242.323	92.036.089	Efisien
	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	805	805	100%	90.000.000	81.995.491	91%	10%	90.000.000	8.004.509	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63	63	100%	12.616.737.941	12.540.784.000	99%	1%	12.616.737.941	75.953.941	Efisien
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	95	95	100%	110.000.000	91.986.631	84%	20%	110.000.000	18.013.369	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55	55	100%	14.117.845.000	13.967.397.000	99%	1%	14.117.845.000	150.448.000	Efisien
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4	4	100%	2.657.928.000	2.637.976.483	99%	1%	2.657.928.000	19.951.517	Efisien
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	100	100	100%	63.070.888.162	62.549.082.916	99%	1%	63.070.888.162	521.85.246	Efisien
	Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas sekolah	7	7	100%	1.217.500.000	1.204.308.300	99%	1%	1.217.500.000	13.191.700	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas sekolah	14	14	100%	5.024.556.000	4.983.586.525	99%	1%	5.024.556.000	40.969.475	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1	1	100%	500.000.000	489.822.000	98%	2%	500.000.000	10.178.000	Efisien
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1000	1000	100%	190.000.000	181.043.600	95%	5%	190.000.000	8.956.400	Efisien
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan sekolah Menengah Pertama	285	285	100%	2.767.850.000	2.406.750.000	87%	15%	2.767.850.000	361.100.000	Efisien

	Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	73	73	100%	71.400.000	50.129.000	70%	42%	71.400.000	21.271.000	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah	28	28	100%	4.990.000.000	4.990.000.000	100%	0%	4.990.000.000	-	Impas
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	138	138	100%	47.787.934.662	47.738.572.741	100%	0%	47.787.934.662	49.361.921	Efisien
	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	138	138	100%	60.000.000	53.850.600	90%	11%	60.000.000	6.149.400	Efisien
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	185	185	100%	61.647.500	57.841.150	94%	7%	61.647.500	3.806.350	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2	2	100%	400.000.000	393.179.000		2%	400.000.000	6.821.000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	100	100	100%	29.245.380.000	29.115.885.669	100%	0%	29.245.380.000	129.494.331	Efisien
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan bagi satuan PAUD	500	500	100%	2.033.450.000	1.953.350.000	96%	4%	2.033.450.000	80.100.000	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60	60	100%	3.554.500.000	3.554.208.000	100%	0%	3.554.500.000	292.000	Efisien
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1245	1245	100%	22.846.340.000	22.814.386.670	100%	0%	22.846.340.000	31.953.330	Efisien
	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	160	160	100%	60.000.000	57.804.000	96%	4%	60.000.000	2.196.000	Efisien
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	1	100%	120.000.000	117.731.500	98%	2%	120.000.000	2.268.500	Efisien
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	16	16	100%	580.090.000	569.501.999	98%	2%	580.090.000	10.588.001	Efisien
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	120	120	100%	51.000.000	48.903.500	96%	4%	51.000.000	2.096.500	Efisien
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	100	100	100%	8.152.515.000	8.148.336.475	100%	0%	8.152.515.000	4.178.525	Efisien
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/kesetaraan	20	20	100%	2.150.000.000	2.150.000.000	100%	0%	2.150.000.000	-	Impas
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	31	31	100%	5.936.890.000	5.935.173.325	100%	0%	5.936.890.000	1.716.675	Efisien
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	31	31	100%	31.250.000	30.327.400	97%	3%	31.250.000	922.600	Efisien

	Nonformal/Kesetaraan										
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	75	75	100%	34.375.000	32.835.750	96%	5%	34.375.000	1.539.250	Efisien
	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	100	100	100%	133.000.000	115.157.535	87%	15%	133.000.000	17.842.465	Efisien
	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	100	100	100%	133.000.000	115.157.535	87%	15%	133.000.000	17.842.465	Efisien
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	100%	133.000.000	115.157.535	87%	15%	133.000.000	17.842.465	Efisien

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pelaksanaan target dan realisasi Tujuan dan sasaran terhadap pagu dan realisasi anggaran di dapatkan dari 3 tujuan/sasaran 1 realisasi melewati target dan penggunaan anggaran efisien sementara 2 tujuan/sasaran tidak mencapai target dan penggunaan anggaran tidak efisien.

#### 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Tujuan 1	Harapan Lama Sekolah	95,38				

	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas						
		Rata-rata Lama	96,28				
1.1	Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaran	98,93				
		Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Nonformal / Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	138,09				
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	% APS PAUD, SD, SMP dan PNF	98,93	Menunjang
				<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		Menunjang
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				
			Prosentase Satuan Pendidikan SD/MI yang telah terakreditasi Minimal B				
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 ruang	100	Menunjang
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	39 unit	100	Menunjang

				Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3	100	Menunjang
				Rehabilitas Sedang/Berat perpustakaan Sekolah	1 ruang	100	Menunjang
				Pengadaan Mebel Sekolah	6 paket	100	Menunjang
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1500 siswa	100	Menunjang
				Penyediaan pendidik dan tenaga kesatuan kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah Dasar	1000 org	100	Menunjang
				Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	95 org	100	Menunjang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah	15 sek	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	805 sek	100	Menunjang
				Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	805 org	100	Menunjang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	63 unit	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	95 org	100	Menunjang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55 org	100	Menunjang
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4 paket	100	Menunjang
				<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		Menunjang

					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		
					Jumlah Satuan Pendidikan SMP/MTs yang telah terakreditasi Minimal B		
				Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas sekolah	7 unit	100	Menunjang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas sekolah	14 ruang	100	Menunjang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1 ruang	100	Menunjang
				Pengadaan Mebel sekolah	3 paket	100	Menunjang
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1000 siswa	100	Menunjang
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan sekolah Menengah Pertama	285 org	100	Menunjang
				Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	73 org	100	Menunjang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah	28 sek	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	138 sek	100	Menunjang
				Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS	138 org	100	Menunjang

				Sekolah Menengah Pertama			
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	185 org	100	Menunjang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 ruang	100	Menunjang
				<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		Menunjang
					Prosentase Satuan Pendidikan PAUD yang telah terakreditasi Minimal B		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan bagi satuan PAUD	500 org	100	Menunjang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60 lmbg	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	1245 lmbg	100	Menunjang
				Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	160 org	100	Menunjang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100	Menunjang
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	16 paket	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	120 org	100	Menunjang
					Angka Partisipasi Kasar		

				<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	(APK) Pendidikan Non Formal (PNF) / Kesetaraan		
					Prosentase Satuan Pendidikan PNF/Kesetaraan yang telah terakreditasi Minimal B		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/kesetaraan	20 lmbg	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	31 lmbg	100	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	31 org	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	75 org	100	Menunjang
				<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Indeks Distribusi Guru		Menunjang
				<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100	Menunjang
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	1 dok	100	Menunjang

				dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	107,90				
		Indek Kepuasan Masyarakat	96,68				
		Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	3,456				
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintahan		
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah		
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		Menunjang

				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dok	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dok	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	100	Menunjang
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 bln	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 lap	100	Menunjang

				Keuangan Akhrit Tahun SKPD			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100	Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	100	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	100	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	100	Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1 paket	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	1 dok	100	Menunjang
				Penyediaan bahan/material	1 paket	100	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 lap	100	Menunjang
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	Menunjang

					Pemerintah Daerah		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	100	Menunjang
				Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	100	Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan jasa surat menyurat	1 lap	100	Menunjang
				Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	1 lap	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 lap	100	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		100	Menunjang

				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		100	Menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 3 (tiga) program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, kegiatan yang telah dilaksanakan, 12 (dua belas) kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

### C. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>1073335384248</b>	<b>1046806140772</b>	<b>97,53</b>
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>823953408822</b>	<b>798974749435</b>	<b>96,97</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	478799800	464976000	97,11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	816675440022	792043633033	96,98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1343815000	1138802801	84,74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3260000000	3225080555	98,93

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1645310000	1566384066	95,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550044000	535872980	97,42
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>249248975426</b>	<b>247719421581</b>	<b>99,39</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	148780192264	147906116521	99,41
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	63070888162	62549082916	99,17
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29245380000	29115885669	99,56
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8152515000	8148336475	99,95
<b>3</b>	<b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>130.000.000</b>	<b>115157535</b>	<b>86,58</b>
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	130.000.000	115157535	86,58

# BAB IV

# PENUTUP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 95,71%% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 114,25% (kategori Sangat tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 69,34% (kategori Sedang)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.073.335.384.248,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.046.806.140.772,00 dengan demikian

dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 97,53% dan nilai efisiensi anggaran sebesar -2%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.



Purwodadi, 26 Maret 2026  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

Drs. H. Purnyomo, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196711271995121002